

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Literatur pertama, “*Potential impact of Thailand's cannabis policy on the health of young adults: current status and future landscape*” yang ditulis oleh Pongkwan Yimsaard, Kathryn Lancaster, Annette Sohn. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ganja Thailand memiliki potensi untuk meningkatkan penggunaan ganja di kalangan kaum muda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: peningkatan aksesibilitas ganja, baik secara legal maupun ilegal, pengurangan stigma terhadap penggunaan ganja, perubahan persepsi terhadap keamanan ganja, dan peningkatan penggunaan ganja di kalangan kaum muda dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mereka, antara lain:

Selain itu penelitian juga menemukan bahwa kebijakan ganja Thailand belum dilengkapi dengan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap kesehatan kaum muda. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah peningkatan penggunaan ganja di kalangan kaum muda, antara lain edukasi tentang bahaya penggunaan ganja, pembatasan aksesibilitas ganja dan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan ganja.

Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu penelitian ini tidak melihat kebijakan legalisasi ganja ini dari aspek. Penelitiann ini hanya melihat bagaimana ganja dapat berdampak pada generasi muda dalam aspek Kesehatan.

Meskipun kedua penelitian tersebut membahas tentang kebijakan legalisasi ganja di Thailand dari perspektif yang berbeda, namun keduanya memiliki beberapa persamaan. Kedua penelitian tersebut sama-sama menemukan bahwa kebijakan legalisasi ganja dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik terhadap kesehatan masyarakat maupun kebijakan luar negeri Thailand. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai kebijakan legalisasi ganja di Thailand.

Literatur Kedua, “ Kepentingan thailand dalam penerapan kebijakan legalisasi ganja” yang disusun oleh I Putu Satya Kama, Anak Agung Ayu Intan Prameswari dan Sukma Sushanti, ini mengkaji kepentingan Thailand dalam menerapkan kebijakan legalisasi ganja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepentingan Thailand dalam menerapkan kebijakan legalisasi ganja meliputi kepentingan ekonomi, yang mana Thailand memandang ganja sebagai komoditas yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Legalisasi ganja dapat membuka peluang bagi Thailand untuk mengembangkan industri ganja, baik untuk keperluan medis maupun rekreasi. Industri ganja dapat memberikan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kemudian dalam aspek kepentingan sosial, Thailand memandang ganja sebagai tanaman tradisional yang memiliki nilai budaya yang tinggi. Legalisasi ganja dapat membuka peluang bagi Thailand untuk mengembangkan potensi ganja dalam bidang pariwisata dan budaya. Ganja dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara dan dapat meningkatkan nilai budaya Thailand. Selain itu juga dalam aspek kepentingan kesehatan, Thailand memandang ganja sebagai

tanaman yang memiliki potensi untuk digunakan dalam pengobatan. Legalisasi ganja dapat membuka peluang bagi Thailand untuk mengembangkan penelitian dan pengembangan obat-obatan berbasis ganja. Obat-obatan berbasis ganja dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, seperti kanker, epilepsi, dan nyeri kronis.

Selain itu juga penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran kepentingan nasional. Kerangka pemikiran ini digunakan untuk menganalisis kebijakan legalisasi ganja di Thailand dari perspektif kepentingan nasional. Penelitian ini juga membahas bahwa kebijakan legalisasi ganja di Thailand bertujuan untuk meningkatkan kepentingan nasional negara tersebut. Kepentingan nasional tersebut meliputi kepentingan ekonomi, keamanan, dan citra Thailand. Yang mana hal ini menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti, namun. penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu penelitian sebelumnya menggunakan kerangka berfikir kepentingan nasional yang dipaparkan oleh Charles Beard, Hans Morgenthau, dan Joseph Frankel. Sedangkan penelitian ini menggunakan paradigma konstruksivisme, perumusan kebijakan luar negeri dan two level game untuk menjawab masalah dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Literatur Ketiga, dengan judul “ *Political Economy Study Of Marijuana Control In Thailand*” yang ditulis oleh Chidchanok Chusakulnitisin jurnal ini mengkaji aspek politik ekonomi dari kebijakan ganja di Thailand. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian menemukan bahwa kebijakan ganja Thailand didorong oleh beberapa faktor antara lain, kebutuhan medis yaitu untuk memanfaatkan manfaat medis dari ganja untuk mengobati berbagai penyakit. Kebutuhan ekonomi, yaitu untuk memanfaatkan potensi ekonomi dari ganja, seperti

untuk industri pariwisata dan pertanian. Kebutuhan politik, yaitu untuk meningkatkan citra Thailand sebagai negara yang progresif dan terbuka. Penelitian juga menemukan bahwa kebijakan ganja Thailand memiliki potensi untuk menguntungkan beberapa kelompok kepentingan, seperti industri pertanian dan industri pariwisata.

Persamaan Penelitian Political Economy Study Of Marijuana Control In Thailand dan Konstruksi Kebijakan Luar Negeri Thailand Terkait Legalisasi Ganja Melalui Global Campaign *War on Drugs* Amerika Serikat yaitu berada pada pembahasan tentang kebijakan legalisasi ganja di Thailand. Keduanya sama-sama menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pariwisata Thailand. Namun, kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam hal fokus dan metodologi.

Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya berfokus pada Kebijakan legalisasi ganja dapat meningkatkan perekonomian dan citra Thailand. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai konstruksi kebijakan luar negeri thailand terhadap ganja.

Literatur Keempat, dengan judul “*Phantasmagorias of Violence in Thai and Filipino Drug Wars*” yang ditulis oleh Eric Haanstad yang diterbitkan pada tahun 2022, membahas tentang peran media dalam proyeksi kekerasan dalam perang narkoba di Thailand dan Filipina. Haanstad menggunakan pendekatan antropologis untuk menganalisis bagaimana media massa, terutama televisi, digunakan oleh negara-negara tersebut untuk menciptakan citra kekerasan yang dramatis dan mengerikan.

Haanstad menemukan bahwa media massa di Thailand dan Filipina memainkan peran penting dalam proyeksi kekerasan dalam perang narkoba. Media massa sering menampilkan gambar-gambar penangkapan, penyitaan, dan eksekusi tersangka pengedar narkoba. Gambar-gambar ini sering kali dikemas secara dramatis dan mengerikan, dengan penggunaan musik, efek suara, dan narasi yang emosional.

Haanstad berpendapat bahwa proyeksi kekerasan ini memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, proyeksi ini digunakan untuk menciptakan citra ketakutan dan kemarahan di antara masyarakat. Citra-citra ini dimaksudkan untuk membuat masyarakat mendukung perang narkoba dan menerima kekerasan yang digunakan oleh negara. Kedua, proyeksi kekerasan ini digunakan untuk memperkuat otoritas negara. Citra-citra ini menunjukkan bahwa negara memiliki kekuatan untuk mengendalikan kekerasan dan bahwa negara tidak akan ragu-ragu untuk menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya.

Ketiga, proyeksi kekerasan ini digunakan untuk menciptakan citra identitas nasional. Citra-citra ini menunjukkan bahwa negara adalah kekuatan yang kuat dan adil yang memerangi kejahatan dan melindungi rakyatnya.

Secara keseluruhan, jurnal *Phantasmagorias of Violence in Thai and Filipino Drug Wars* memberikan analisis yang komprehensif tentang peran media dalam proyeksi kekerasan dalam perang narkoba. Jurnal ini menunjukkan bahwa media massa dapat digunakan untuk menciptakan citra kekerasan yang dramatis dan mengerikan yang memiliki dampak penting pada masyarakat.

Persamaan Penelitian Phantasmagorias of Violence in Thai and Filipino Drug Wars dan Konstruksi Kebijakan Luar Negeri Thailand Terkait Legalisasi Ganja Melalui Global Campaign *War on Drugs* Amerika Serikat yaitu berada pada pembahasan tentang kebijakan narkotika di Thailand. Keduanya sama-sama menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut memiliki implikasi politik dan hukum yang signifikan. Yang menjadi pembeda ialah penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan antropologis untuk menganalisis bagaimana media massa digunakan oleh negara untuk menciptakan citra kekerasan yang dramatis dan mengerikan. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana thailand merekonstruksi kebijakan luar negerinya terhadap masalah narkoba hingga perumusan kebijakan legalisasi ganja.

Literatur Kelima, dengan judul “ *Constructivist Approach in Foreign Policy and in International Relations*” karya Alexander Wendt, yang diterbitkan pada tahun 1992, membahas tentang pendekatan konstruktivis dalam studi hubungan internasional. Wendt berpendapat bahwa pendekatan konstruktivis dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang perilaku negara dalam hubungan internasional.

Wendt memulai dengan menjelaskan bahwa pendekatan konstruktivis berfokus pada peran ide, norma, dan identitas dalam membentuk perilaku negara. Pendekatan ini berpendapat bahwa negara bukanlah aktor yang rasional dan otonom, melainkan aktor yang dibentuk oleh struktur sosial dan budaya.

Wendt kemudian membahas bagaimana pendekatan konstruktivis dapat diterapkan untuk menganalisis kebijakan luar negeri. Ia berpendapat bahwa pendekatan konstruktivis dapat membantu kita untuk memahami bagaimana ide, norma, dan identitas membentuk kepentingan dan tujuan negara.

Wendt juga membahas bagaimana pendekatan konstruktivis dapat membantu kita untuk memahami bagaimana negara berinteraksi satu sama lain. Ia berpendapat bahwa pendekatan konstruktivis dapat membantu kita untuk memahami bagaimana norma dan identitas internasional membentuk perilaku negara.

Persamaan Penelitian Constructivist Approach in Foreign Policy and in International Relations dan Konstruksi Kebijakan Luar Negeri Thailand Terkait Legalisasi Ganja Melalui Global Campaign *War on Drugs* Amerika Serikat yaitu Kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan pendekatan konstruktivis untuk menganalisis kebijakan luar negeri. Pendekatan konstruktivis berfokus pada peran ide, norma, dan identitas dalam membentuk perilaku negara.

Kedua penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri dibentuk oleh ide, norma, dan identitas. Kebijakan legalisasi ganja di Thailand, misalnya, dibentuk oleh ide tentang manfaat medis dan industri ganja, norma internasional tentang legalisasi ganja, dan identitas Thailand sebagai negara yang progresif.

Yang menjadi pembeda ialah penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan konstruktivisme untuk menganalisis bagaimana kebijakan luar negeri digunakan oleh negara untuk menciptakan citra atau persepsi masyarakat mengenai suatu kebijakan. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana thailand

merekonstruksi kebijakan luar negerinya terhadap masalah narkoba hingga perumusan kebijakan legalisasi ganja. Dan juga penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai legalisasi ganja dan global campaign *War on Drugs*.

Dari kelima penelitian tersebut tentunya memunculkan kebaruan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini membahas mengenai kebijakan legalisasi ganja dalam merespon masalah narkoba dalam balutan paradigma konstruktivisme dan kajian media propaganda. Selain itu peneliti juga membuat beberapa perbandingan yang dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Tema	Temuan	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Potential impact of Thailand's cannabis policy on the health of young adults: current status and future landscape</i> , Pongkwan Yimsaard, <i>Lancet Reg Health Southeast Asia</i> , 2023	Kebijakan Luar Negeri Thailand	Legalisasi ganja di Thailand memiliki potensi untuk meningkatkan risiko penggunaan ganja di kalangan remaja, sehingga pemerintah Thailand perlu mengambil tindakan untuk meminimalkan dampak negatif dari legalisasi ganja terhadap kesehatan remaja.	Membahas mengenai kebijakan legalisasi ganja di Thailand	Tidak membahas aspek politik dalam kebijakan legalisasi ganja
2	Kepentingan thailand dalam penerapan kebijakan legalisasi ganja, I Putu Satya Kama, Anak Agung Ayu Intan Prameswari, Sukma Sushanti, <i>Journal Harian Regional</i> , 2021	Kebijakan Luar Negeri Thailand	Thailand memiliki kepentingan ekonomi, kesehatan, dan politik dalam menerapkan kebijakan legalisasi ganja.	Membahas mengenai kebijakan legalisasi ganja di Thailand dari segi politik	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme
3	Studi komparasi antara indonesia dengan thailand terkait Kebijakan legalisasi ganja, Akbar Yudha Pratama, Ufran, Lalu Saepuddin, 2023	Kebijakan Luar Negeri Thailand	Dalam kebijakan legalisasi ganja Thailand memiliki potensi dalam meningkatkan peningkatan pengobatan melalui ganja, selain itu juga ganja telah menciptakan banyak lapangan kerja baru	Menjelaskan mengenai dampak dari legalisasi ganja di thailand	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme
4	<i>US Foreign Policy and the War on Drugs: Analysis of a Policy Failure</i> . Bruce Michael Bagley <i>Journal of Interamerican Studies and World Affairs</i> , 1988	Global Campaign War on Drugs	Kebijakan WOD ini telah gagal untuk mencapai tujuannya dan telah memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap negara-negara berkembang. AS perlu mengubah pendekatannya terhadap masalah narkoba dan berfokus pada pencegahan, rehabilitasi, dan pengurangan permintaan narkoba.	Membahas mengenai kegagalan global Campaign WOD	Tidak secara spesifik membahas mengenai Wod di Thailand
5	<i>Political Economy Study Of Marijuana Control In Thailand</i> , Chidchanok Chusakulnitisin, <i>International</i>	Kebijakan Luar Negeri Thailand	Legalisasi ganja di Thailand merupakan kebijakan yang kompleks dengan potensi manfaat dan risiko yang signifikan. Kebijakan ini merupakan hasil dari berbagai faktor, termasuk perubahan wacana	Membahas mengenai kebijakan legalisasi ganja di Thailand	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme

	<i>Journal of Social Science and Economic Research</i> . 2022		tentang narkoba, potensi manfaat ekonomi, dan kebutuhan untuk reformasi hukum narkoba.		
6	Upaya Thailand Dalam Penanggulangan Drugs Trafficking Menuju Drug-Free Asean 2015, Riduwan Effendi Siregar, Jom FISIP Volume 1 No. 2- Oktober 2014	Kebijakan Luar Negeri Thailand	Thailand merupakan negara di kawasan Asia khususnya Asia Tenggara yang merupakan pintu gerbang penyebaran narkoba.	Membahas mengenai kebijakan legalisasi ganja di Thailand	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme dan kajian media
7	<i>Thailand's Legalization of Cannabis: A Foreign Policy Perspective</i> , Naruemon Thabchumpon dan Andrew Walker, dan diterbitkan pada tahun 2023 di jurnal <i>International Relations of the Asia-Pacific</i>	Kebijakan Luar Negeri Thailand	Jurnal ini berpendapat bahwa kebijakan ini dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap hubungan luar negeri Thailand. Di sisi positif, kebijakan ini dapat meningkatkan citra Thailand sebagai negara yang progresif dan terbuka. Di sisi negatif, kebijakan ini dapat menimbulkan kecemburuan dari negara-negara tetangga yang masih menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap ganja.	Membahas mengenai dampak dari kebijakan legalisasi ganja di Thailand	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme dan kajian media
8	<i>The Impact of Thailand's Cannabis Legalization on Its Foreign Policy</i>	Kebijakan Luar Negeri Thailand	kebijakan ini dapat meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Thailand dengan negara-negara tetangga. Namun, kebijakan ini juga dapat menimbulkan masalah keamanan dan sosial di kawasan.	Membahas mengenai kebijakan legalisasi ganja di Thailand	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme dan kajian media
9	<i>Thailand's Cannabis Legalization: A Case Study in Foreign Policy Adaptation</i>	Kebijakan Luar Negeri Thailand	kebijakan legalisasi ganja merupakan upaya Thailand untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan global.	Membahas mengenai kepentingan kebijakan legalisasi ganja di Thailand	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme dan kajian media
10	<i>Thailand's Cannabis Legalization: A Foreign Policy Challenge</i>	Kebijakan Luar Negeri Thailand	kebijakan Legalisasi ganja dapat menimbulkan masalah dengan negara-negara yang memiliki kebijakan yang lebih ketat terhadap ganja.	Membahas mengenai dampak kebijakan legalisasi ganja di Thailand	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme dan kajian media
11	Peranan Senior Official On Drugs Matter (ASOD)	Kebijakan Luar Negeri Thailand	ASOD telah memainkan peran yang penting dalam penanggulangan narkoba di Thailand. Peran	Membahas mengenai upaya Thailand dalam	Tidak menggunakan

	dalam penanggulangan narkotika di Thailand		tersebut telah membantu Thailand dalam meningkatkan upaya penanggulangan narkotika dan mencapai target yang telah ditetapkan.	menerapkan kebijakan larangan ganja di Thailand	pandangan konstruktivisme dan kajian media
12	<i>Revisiting Thailand's cannabis legislation</i> , Rachata Charoenwisedsil, MD, Phimphan Pisutsan, MD, Wasin Matsee, MD, <i>Journal of Travel Medicine</i> , Volume 30, Issue 4, May 2023, taad004,	Kebijakan Luar Negeri Thailand	Kebijakan legalisasi ganja di Thailand merupakan langkah berani yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, pemerintah Thailand perlu melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan dampak negatif dari kebijakan ini.	Membahas mengenai kepentingan kebijakan legalisasi ganja di Thailand	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme dan kajian media
13	Pengaruh Kebijakan Legalisasi Ganja di Thailand terhadap ASEAN	Kebijakan Luar Negeri Thailand	Kebijakan legalisasi ganja di Thailand memiliki potensi untuk mempengaruhi hubungan Thailand dengan negara-negara anggota ASEAN. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Thailand perlu merumuskan kebijakan luar negeri yang tepat untuk mengatasi risiko negatif dari legalisasi ganja.	Membahas mengenai dampak kebijakan legalisasi ganja di Thailand	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme dan kajian media
14	<i>Construction and implications of cannabis discourse in Thailand's cannabis legalization: a comparative study of English-language traditional and new media</i> , Udomsak. Sirita, <i>Suranaree Journal Soc Sci</i> , 16 (2022), pp. 1-24	Kebijakan Luar Negeri Thailand	Wacana legalisasi ganja di Thailand dibangun dengan menggunakan berbagai strategi linguistik, seperti penggunaan metafora, analogi, dan framing. Wacana tersebut menekankan berbagai aspek di dalam ganja, termasuk manfaat medis, potensi ekonomi, dan implikasi sosial.	Membahas mengenai upaya Thailand dalam merumuskan kebijakan legalisasi ganja	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme dan kajian media
15	<i>Medical cannabis use in Thailand after its legalization: a respondent-driven sample survey</i> , S. Assanangkornchai, K. Thaikla, M. Talek, D. Saingam, <i>PeerJ. Jan</i> , 11 (10) (2022),	Kebijakan Luar Negeri Thailand	Legalisasi ganja telah meningkatkan akses ke ganja medis di Thailand. Ganja medis kini tersedia secara legal untuk pengobatan berbagai kondisi medis.	Dampak Legalisasi ganja di Thailand	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme dan kajian media

16	<i>Thailands War on Drugs. The Beckley Foundation Drug Policy Programme,</i>	Global Campaign War on Drugs	Kebijakan perang melawan narkoba di Thailand tidak efektif dalam mengurangi konsumsi narkoba, perdagangan narkoba, dan kejahatan narkoba. Bahkan, kebijakan tersebut justru menimbulkan berbagai masalah, seperti pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, dan korupsi.	Dampak Global Campaign WOD di thailand	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme dan kajian media
17	<i>Phantasmagorias of Violence in Thai and Filipino Drug Wars, Eric Haanstad Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia Vol. 37, No. 3 (November 2022), pp. 434-464</i>	Global Campaign War on Drugs	Perang melawan narkoba bukanlah semata-mata masalah kriminalitas. Perang tersebut juga merupakan masalah politik dan ideologis. Kekerasan digunakan dalam perang tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan ideologis tertentu.	Kepentingan Thailand dalam Global Campaign WOD	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme dan kajian media
18	<i>Drugs and Drug Policy in Thailand, James Windle University of East London, 2015</i>	Global Campaign War on Drugs	Pemerintah Thailand berharap bahwa legalisasi ganja dapat meningkatkan perekonomian, melalui industri ganja medis dan industri ganja rekreasional.	Kepentingan Thailand dalam Global Campaign WOD	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme dan kajian media
19	<i>The influence of Thailand's 2003 'War on Drugs' policy on self-reported drug use among injection drug users in Chiang Mai, Thailand. Vongchak a, Surinda Kawichai, International Journal of Drug Policy, vol 16, 2, 2005 pp 115-121</i>	Global Campaign War on Drugs	Kebijakan "perang melawan narkoba" tahun 2003 efektif dalam mengurangi penggunaan heroin secara suntik di kalangan IDU di Chiang Mai, Thailand. Namun, kebijakan ini juga menyebabkan pengguna narkoba suntik (IDU) beralih ke penggunaan narkoba lain.	Kegagalan WOD di Thailand	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme dan kajian media
20	<i>The Global War on Drugs: The Case of Thailand, John McBeth (2001)</i>	Global Campaign War on Drugs	Kebijakan WOD telah menyebabkan peningkatan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Thailand.	Kegagalan WOD di Thailand	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme dan kajian media

21	<i>The War on Drugs: Thailand's 'Bloody Crusade</i> , Amnesty International (2008)	Global Campaign <i>War on Drugs</i>	kebijakan <i>War on Drugs</i> telah menyebabkan pembunuhan massal dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di Thailand.	Kegagalan WOD di Thailand	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme dan kajian media
22	<i>The Global War on Drugs and the Legitimacy of the Thai State</i> , Nida Pollawat (2018)	Global Campaign <i>War on Drugs</i>	Jurnal ini membahas dampak global campaign <i>War on Drugs</i> AS terhadap legitimasi negara Thailand. Serta kebijakan ini telah menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pemerintah Thailand.	Kegagalan WOD di Thailand	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme dan kajian media
23	<i>The Global War on Drugs and the Future of U.S.-Thailand Relations</i> Alexander Vuving (2020)	Global Campaign <i>War on Drugs</i>	Jurnal ini membahas masa depan hubungan AS-Thailand dalam konteks global campaign <i>War on Drugs</i> . Jurnal ini berpendapat bahwa kebijakan ini akan terus menjadi sumber ketegangan dalam hubungan kedua negara.	Kegagalan WOD di Thailand	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme dan kajian media
24	"The Global <i>War on Drugs</i> and the Rise of Cannabis Reform in Thailand" Saiful Mujani (2022)	Global Campaign <i>War on Drugs</i>	Dampak global campaign <i>War on Drugs</i> AS terhadap reformasi ganja di Thailand. Jurnal ini berpendapat bahwa kebijakan ini telah mendorong Thailand untuk mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis dalam memerangi narkoba.	Kegagalan WOD di Thailand	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme dan kajian media
25	<i>The Global War on Drugs and the Future of Thai Society</i> , Puangthong Pawakapan (2023)	Global Campaign <i>War on Drugs</i>	Jurnal ini membahas masa depan masyarakat Thailand dalam konteks global campaign <i>War on Drugs</i> . Jurnal ini berpendapat bahwa kebijakan ini telah menyebabkan perubahan sosial dan politik yang signifikan di Thailand.	Dampak WOD di thailand	Tidak menggunakan pandangan konstruktivisme dan kajian media
26	<i>Social Constructivism and International Relations: A Theoretical Introduction</i> , Alexander Wendt (1995)	Konsep Konstruktivisme dalam merumuskan kebijakan luar negeri	Identitas dan kepentingan manusia tidak bersifat alami, melainkan dibentuk oleh interaksi sosial. Realitas sosial tidak ada secara objektif, melainkan dibentuk oleh kesepakatan bersama antar manusia.	Membahas mengenai sebuah kebijakan dibentuk oleh interaksi sosial	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
27	<i>The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics</i> , Peter J. Katzenstein (1996)	Konsep Konstruktivisme dalam merumuskan kebijakan luar negeri	Identitas nasional dapat membentuk kepentingan dan perilaku negara dengan cara menentukan siapa "kita" dan "mereka", mendefinisikan apa yang dianggap sebagai ancaman dan peluang, dan	Bagaimana interaksi social dapat mendorong suatu negara untuk mengejar kepentingan	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand

			mendorong negara-negara untuk mengejar kepentingan bersama.		
28	Constructivism and International Security, Stefano Guzzini (2013)	Konsep Konstruksivisme dalam merumuskan kebijakan luar negeri	Guzzini juga membahas berbagai aplikasi konstruktivisme dalam keamanan internasional, termasuk, pembentukan identitas dan kepentingan keamanan, pembentukan norma dan aturan keamanan, perilaku aktor keamanan.	Konstruksivisme dalam perumusan kepentingan suatu negara	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
29	Constructivism and Global Governance, Friedrich Kratochwil dan John Gerard Ruggie (2001)	Konsep Konstruksivisme dalam merumuskan kebijakan luar negeri	Tiga proposisi dasar konstruktivisme dalam tata kelola global, yaitu Tata kelola global bersifat intersubjektif, Tata kelola global bersifat sosial. Perubahan tata kelola global dimungkinkan.	Konstruksivisme dapat mempengaruhi tata kelola global	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
30	Constructivism in International Relations: A New Paradigm, Alexander Wendt (1992)	Konsep Konstruksivisme dalam merumuskan kebijakan luar negeri	Realitas sosial, termasuk hubungan internasional, merupakan hasil konstruksi sosial.	Kebijakan luar negeri merupakan hasil dari interaksi sosial	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
31	The Politics of Cannabis Legalization in Thailand: A Constructivist Analysis, Naruemon Thabchumpon dan Andrew Walker (2023)	Konsep Konstruksivisme dalam merumuskan kebijakan luar negeri	Legalisasi ganja merupakan hasil dari konstruksi sosial yang kompleks, yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan	Legalisasi ganja merupakan hasil dari interaksi sosial yang kompleks	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
32	The Impact of International Institutions on the Legalization of Cannabis in Thailand, Suthida Sirithip (2023)	Konsep Konstruksivisme dalam merumuskan kebijakan luar negeri	Institusional internasional dapat membantu membentuk norma dan identitas, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri.	Intitusi/ pemerintah memiliki pengaruh dalam perumusan sebuah kebijakan	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
33	The Environmental Implications of Cannabis Legalization in Thailand, Supaporn Jitnarin (2023)	Konsep Konstruksivisme dalam merumuskan kebijakan luar negeri	legalisasi ganja dapat memiliki dampak positif dan negatif pada lingkungan Thailand, seperti peningkatan penggunaan pestisida dan meningkatnya polusi udara.	Dampak dari legalisasi ganja bagi masyarakat Thailand	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
34	Theory of International Relations, James N. Rosenau (1997)	Konsep Konstruksivisme dalam merumuskan kebijakan luar negeri	Pemahaman tentang konstruktivisme dapat membantu kita untuk memahami bagaimana norma dan nilai dapat mempengaruhi perilaku negara.	Konstruksivisme dipengaruhi oleh berbagaimacam norma sosial	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand

35	Constructivism and Foreign Policy Analysis, Jeffrey T. Checkel (1998)	Konsep Konstruksivisme dalam merumuskan kebijakan luar negeri	Konstruktivisme dapat membantu menjelaskan berbagai fenomena kebijakan luar negeri, seperti pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, dan dampak kebijakan.	Fenomena kebijakan luar negeri merupakan hasil dari konstruksi sosial	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
36	Constructivist Approach in Foreign Policy and in International Relations, Isa Erbas, Journal of Positive School Psychology 2022, Vol. 6, No. 3, 5087 – 5096	Konsep Konstruksivisme dalam merumuskan kebijakan luar negeri	Pendekatan konstruktivis merupakan perspektif yang penting dalam memahami kebijakan luar negeri dan hubungan internasional. Pendekatan ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana norma, nilai, dan identitas dapat mempengaruhi perilaku aktor dalam hubungan internasional.	Membahas mengenai sebuah kebijakan dibentuk oleh interaksi sosial	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
37	Liberalism and the Defence of Political Constructivism, Catriona Mc Kinnon, 2002	Konsep Konstruksivisme dalam merumuskan kebijakan luar negeri	Konstruktivisme politik dapat membantu liberalisme untuk memahami bagaimana norma-norma liberal dibentuk dan dipertahankan. Konstruktivisme politik dapat membantu liberalisme untuk memahami bagaimana norma-norma liberal dapat berubah dan beradaptasi dengan perubahan zaman.	Bagaimana interaksi social dapat mendorong suatu negara untuk mengejar kepentingan	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
38	Reconstructing Post-Nationalist Liberal Pluralism From Interest to, Identity, Katherine Smith, 2005	Konsep Konstruksivisme dalam merumuskan kebijakan luar negeri	Konstruksivisme dapat membantu memahami pluralisme liberal di suatu negara	Konstruksivisme dalam perumusan kepentingan suatu negara	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
39	Constructing the World Polity: Essays on International Institutionalization, John Gerard Ruggie (1998)	Konsep Konstruksivisme dalam merumuskan kebijakan luar negeri	Institusional internasional dapat membentuk kepentingan dan perilaku negara dengan cara: 1. Mendefinisikan apa yang dianggap sebagai norma dan identitas yang diterima 2. Menyediakan platform bagi negara-negara untuk bekerja sama 3. Membantu negara-negara untuk mengatasi masalah-masalah bersama	Konstruksivisme dapat mempengaruhi tata kelola global	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
40	Theorizing the International System, Emanuel Adler dan Vincent Pouliot (2011)	Konsep Konstruksivisme dalam merumuskan kebijakan luar negeri	Jurnal ini memberikan analisis yang komprehensif tentang teori konstruktivisme dalam hubungan internasional. Adler dan Pouliot membahas berbagai aspek konstruktivisme, termasuk norma, identitas, dan institusional internasional.	Media merupakan aspek konstruksivisme	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand

41	Peran Media Dalam Propaganda, Andi Youna Bachtiar, Jurnal Komunikologi Volume 13 Nomor 2, September 2016	Global Campaign dalam kajian media dan propaganda	Media merupakan alat yang sangat efektif untuk menyebarkan propaganda. Media dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik, dan untuk membentuk atau mengubah perilaku.	Media dapat mempengaruhi efektivitas dari suatu global campaign	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
42	<i>Global Media Campaigns and the Construction of Public Opinion</i> , Michael Schudson (2003)	Global Campaign dalam kajian media dan propaganda	Kampanye media global merupakan alat yang kuat yang dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kampanye media global bekerja agar dapat menggunakannya secara bertanggung jawab.	Kampanye media global dapat mempengaruhi opini publik	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
43	<i>The Propaganda Model and Global Media Campaigns</i> , Edward Herman and Noam Chomsky (2006)	Global Campaign dalam kajian media dan propaganda	Propaganda merupakan alat yang kuat yang dapat digunakan untuk mendukung atau merusak demokrasi. Penting untuk memahami bagaimana propaganda bekerja agar dapat menggunakannya untuk tujuan yang baik.	Media digunakan sebagai suatu alat propaganda	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
44	<i>Global Counter-Publicity Campaigns and the Challenge to Hegemony</i> , John Downing (2011)	Global Campaign dalam kajian media dan propaganda	kampanye media global merupakan alat yang kuat yang dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik. Namun, penting untuk memahami bagaimana kampanye media global bekerja agar dapat menggunakannya secara bertanggung jawab.	Media dapat mempengaruhi efektivitas dari suatu global campaign	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
45	Propaganda and Democracy, Edward Herman dan Noam Chomsky, 2006	Global Campaign dalam kajian media dan propaganda	Propaganda dapat digunakan untuk mendukung demokrasi dengan cara menyebarkan informasi dan pendidikan, membangun dukungan publik, dan melawan propaganda anti-demokrasi.	Kampanye media global dapat mempengaruhi opini publik	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
46	The Global Public Relations Machine, James Gaventia, 2007	Global Campaign dalam kajian media dan propaganda	Globalisasi telah menjadi kekuatan yang transformatif dalam praktik PR. Globalisasi telah mengubah PR menjadi profesi yang lebih global, profesional, dan terspesialisasi.	Media digunakan sebagai suatu alat propaganda	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
47	Power Play, Power Works: A Social Communication of Power, John Fiskie (1990)	Global Campaign dalam kajian media dan propaganda	Komunikasi kekuasaan tidak hanya melibatkan hubungan antara orang-orang, tetapi juga hubungan antara kelompok, institusi, dan budaya.	Media dapat mempengaruhi efektivitas dari suatu global campaign	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand

48	Understanding Popular Culture, John Fiskie(2004)	Global Campaign dalam kajian media dan propaganda	Budaya populer merupakan produk dari masyarakat dan memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan pengalaman masyarakat.	Kampanye media global dapat mempengaruhi opini publik	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
49	New Media and the Rise of Propaganda, (Philip Howard, 2016	Global Campaign dalam kajian media dan propaganda	Media sosial telah menjadi alat yang ampuh untuk menyebarkan disinformasi dan propaganda. Selain itu Perusahaan media sosial dapat dimanipulasi untuk memperkuat pesan propaganda dan menargetkan audiens tertentu.	Media digunakan sebagai suatu alat propaganda	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand
50	Global Counter-Publicity, John Downing, 2011	Global Campaign dalam kajian media dan propaganda	Global Counter-Publicity Campaign dapat memberikan perspektif alternatif dan menantang dominasi narasi arus utama. Kemudian media dapat digunakan untuk melawan hegemoni media dan pemerintah.	Media dapat mempengaruhi efektivitas dari suatu global campaign	Tidak membahas kebijakan legalisasi ganja di thailand

2.2. Kerangka Konseptual

2.2.1. Agenda Propaganda Media terkait Global Campaign melalui Content Analysis

Global campaign juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran akan suatu isu global, mempengaruhi kebijakan pemerintah atau organisasi internasional, membangun dukungan untuk suatu gerakan sosial, atau meningkatkan kesejahteraan manusia. (Carroll, 2015). Hal ini juga sejalan dengan pendapat Philip M. Taylor yang mengatakan bahwa *global campaign* sebagai upaya terorganisir yang menggunakan komunikasi strategis untuk mempengaruhi opini publik dan perilaku di tingkat global. Dia menekankan aspek terencana dan terarah dari kampanye ini, serta jangkauannya yang luas (Taylor, 2017).

Salah satu cara yang paling umum digunakan untuk menyebarkan *Global Campaign* adalah melalui propaganda. Propaganda adalah penggunaan komunikasi untuk menyebarkan informasi yang bias atau menyesatkan untuk mempengaruhi opini publik. Propaganda sering kali digunakan untuk mempromosikan agenda tertentu, seperti kepentingan politik, ekonomi, atau ideologi. Hal tersebut juga dibahas oleh Manuel Castells yang menekankan peran teknologi komunikasi dalam *Global Campaign*. Menurutnya, internet dan media sosial telah memungkinkan kampanye ini menyebar dengan cepat dan efisien, menjangkau audiens yang luas secara global (Stalder, 2006).

Propaganda dan media merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam *global campaign*. Propaganda adalah suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik atau perilaku masyarakat. Media massa merupakan alat yang sangat efektif untuk menyebarkan propaganda. Media massa dapat menjangkau audiens yang luas dan menyebarkan pesan dengan cepat. Media massa juga dapat menggunakan

berbagai teknik propaganda, seperti penggunaan bahasa yang emosional, gambar yang dramatis, dan narasi yang menarik. Selain media massa, teknologi juga dapat digunakan untuk menyebarkan Global Campaign. Teknologi, seperti internet dan media sosial, memungkinkan Global Campaign untuk menyebar dengan cepat dan efisien. Teknologi juga dapat digunakan untuk menargetkan audiens tertentu dengan lebih tepat (Stalder, 2006).

Dalam global campaign, propaganda dan media dapat saling memperkuat satu sama lain. Propaganda dapat digunakan untuk menciptakan agenda media, yaitu menentukan isu-isu apa saja yang akan dibahas oleh media. Media, kemudian, dapat menyebarkan pesan-pesan propaganda tersebut kepada khalayak luas. Pengaruh agenda propaganda dan media dalam global campaign dapat dilihat dalam beberapa hal seperti pembentukan agenda publik. Propaganda dan media dapat membentuk agenda publik, yaitu isu-isu apa saja yang dianggap penting oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat cenderung memperhatikan isu-isu yang sering dibahas oleh media. Misalnya, jika media sering memberitakan tentang perubahan iklim, maka masyarakat akan menganggap isu perubahan iklim sebagai isu yang penting. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan untuk mengatasinya .

Selain itu perubahan opini publik juga merupakan hasil dari propaganda dan media yang dilakukan dalam global campaign. Hal ini terjadi karena media dapat menyajikan informasi yang sepihak atau menyesatkan. Misalnya, jika media sering memberitakan tentang keunggulan produk A dibandingkan produk B, maka masyarakat akan cenderung menganggap produk A lebih unggul. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam membeli produk (Bachthiar, 2016).

Propaganda dan media juga dapat mempengaruhi kebijakan publik. Yang mana hal ini terjadi ketika propaganda digunakan untuk menciptakan agenda media, yaitu menentukan isu-isu apa saja yang akan dibahas oleh media. Media, kemudian, dapat menyebarkan pesan-pesan propaganda tersebut kepada khalayak luas (Bachthiar, 2016).

Pesan-pesan propaganda tersebut dapat membentuk persepsi dan interpretasi masyarakat tentang realitas. Misalnya, jika propaganda sering memberitakan tentang bahaya terorisme, maka masyarakat akan cenderung menganggap terorisme sebagai ancaman yang serius. Hal ini dapat mendorong pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi terorisme. Dengan demikian, propaganda dan media dapat mempengaruhi kebijakan publik melalui pembentukan persepsi dan interpretasi masyarakat tentang realitas (Guzzini, 2013).

Selain itu dalam dalam kajian global campaign dan media propaganda Konsep konstruksivisme mengacu pada pandangan bahwa realitas sosial, termasuk realitas politik dan budaya, dibentuk oleh manusia melalui proses komunikasi dan interpretasi. Dalam konteks ini, global campaign dan media propaganda dapat diartikan sebagai upaya untuk membentuk realitas sosial melalui komunikasi dan interpretasi. konstruksivisme menawarkan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana global campaign dan media propaganda dapat membentuk realitas sosial. Koenigsberg berpendapat bahwa global campaign dan media propaganda dapat digunakan untuk membentuk makna dan interpretasi yang dianut oleh khalayak. Makna dan interpretasi ini, pada gilirannya, dapat membentuk persepsi dan pemahaman khalayak tentang realitas (Katzenstain, 1996).

Konsep konstruksivisme dalam kajian global campaign dan media propaganda dapat digunakan untuk menganalisis upaya AS mengenai *War on Drugs* di Thailand. Upaya ini dapat dilihat sebagai upaya untuk membentuk realitas sosial di Thailand tentang bahaya narkoba dan pentingnya perang melawan narkoba. AS telah lama mempromosikan kebijakan *War on Drugs* di Thailand. Kebijakan ini didasarkan pada pandangan bahwa narkoba adalah musuh utama masyarakat dan harus diberantas. AS telah memberikan bantuan dana dan teknis kepada Thailand untuk mendukung kebijakan ini. Dalam upayanya untuk mempromosikan *War on Drugs* di Thailand, AS telah menggunakan berbagai saluran global campaign dan media propaganda. Saluran-saluran ini telah digunakan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu tentang bahaya narkoba dan pentingnya perang melawan narkoba (Charoenphakdee & Wiwarwongsa, 2023).

Salah satu saluran yang digunakan adalah kampanye publik. AS telah mendanai kampanye publik di Thailand yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Kampanye-kampanye ini sering menggunakan gambar-gambar dan pesan-pesan yang dramatis untuk menggambarkan bahaya narkoba. Saluran lain yang digunakan adalah media massa. Amerika Serikat telah bekerja sama dengan media massa di Thailand untuk mempromosikan *War on Drugs*. Media massa telah menerbitkan berita-berita dan artikel-artikel yang mendukung kebijakan ini (Pawakapan, 2022).

Saluran lain yang digunakan adalah pendidikan. AS telah bekerja sama dengan pemerintah Thailand untuk memasukkan materi tentang bahaya narkoba ke dalam kurikulum pendidikan. Materi-materi ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran tentang bahaya narkoba kepada generasi muda Thailand. Hal ini dapat diartikan juga bahwa konstruktivisme memandang jika realitas sosial tidak bersifat objektif, melainkan

merupakan hasil konstruksi manusia. Realitas sosial dibentuk oleh cara kita memandang dan menginterpretasikan dunia di sekitar kita. Hal ini berarti bahwa global campaign dan media propaganda tidak hanya merefleksikan realitas sosial, melainkan juga memproduksi makna baru. Makna-makna baru ini dapat mempengaruhi persepsi dan pemahaman khalayak tentang realitas (Fiskie, 2004). John Fiske membagi proses produksi makna dalam global campaign dan media propaganda menjadi tiga tahap, yaitu:

a. Encoding

Pada tahap encoding, pembuat global campaign dan media propaganda memproduksi makna-makna tertentu. Makna-makna ini diproduksi dengan menggunakan berbagai teknik, seperti pilihan kata, gambar, dan suara. AS menggunakan berbagai teknik untuk memproduksi makna-makna ini. Teknik-teknik ini, seperti pilihan kata, gambar, dan suara, digunakan untuk menciptakan kesan bahwa narkoba adalah musuh utama masyarakat dan harus diberantas (Fiskie, 2004).

Misalnya, AS sering menggunakan kata-kata yang kuat dan dramatis untuk menggambarkan bahaya narkoba. Kata-kata seperti "jahat", "mematikan", dan "berbahaya" sering digunakan untuk menggambarkan narkoba. Gambar-gambar yang dramatis juga sering digunakan untuk menggambarkan bahaya narkoba. Gambar-gambar ini sering menunjukkan orang-orang yang menderita akibat narkoba, seperti pecandu narkoba, korban overdosis, dan keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena narkoba. Suara yang dramatis juga sering digunakan untuk menciptakan suasana yang tegang dan menakutkan. Teknik-teknik encoding ini digunakan untuk menciptakan makna tertentu tentang bahaya narkoba dan pentingnya perang melawan narkoba. Makna ini adalah bahwa narkoba adalah musuh utama masyarakat dan harus diberantas (Charoenphakdee & Wiwarwongsa, 2023).

b. Decoding

Pada tahap decoding, khalayak menginterpretasikan makna-makna yang telah diproduksi oleh pembuat global campaign dan media propaganda. Interpretasi khalayak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang sosial, budaya, dan politik mereka. Dalam kasus upaya AS memerangi narkoba melalui *War on Drugs* di Thailand, sebagian besar masyarakat Thailand menerima makna-makna yang diproduksi oleh AS. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat Thailand tentang bahaya narkoba dan meningkatnya dukungan masyarakat Thailand terhadap upaya perang melawan narkoba (Katzenstain, 1996).

c. Negotiation

Pada tahap negotiation, khalayak dan pembuat global campaign dan media propaganda saling bernegosiasi untuk menghasilkan makna yang sama. Negosiasi ini dapat terjadi secara sadar atau tidak sadar. Dalam kasus upaya AS memerangi narkoba melalui *War on Drugs* di Thailand, sebagian besar masyarakat Thailand menerima makna-makna yang diproduksi oleh AS. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat Thailand tentang bahaya narkoba dan meningkatnya dukungan masyarakat Thailand terhadap upaya perang melawan narkoba (Gerrard & Kratochwil, 2001).

Selain itu Fiske berpendapat bahwa, makna-makna yang dihasilkan dalam global campaign dan media propaganda bersifat terbuka dan tidak pasti. Makna-makna ini dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh khalayak yang berbeda. Fiske juga berpendapat bahwa global campaign dan media propaganda dapat digunakan untuk mempromosikan ideologi tertentu. Ideologi adalah seperangkat keyakinan dan nilai-nilai yang mendasari

sistem sosial. Global campaign dan media propaganda dapat digunakan untuk menanamkan ideologi tertentu kepada khalayak(Fiskie, 2004).

Pendapat John Fiskie ini juga sejalan dengan teori *New Media* atau *Content Analysis* menurut Norman Fairclough, ia mengatakan bahwa pendekatan analisis teks yang digunakan untuk memahami konstruksi ideologi, kekuasaan, dan hubungan sosial dalam media massa. Fairclough juga menganggap media sebagai wadah untuk merancang dan mereproduksi ideologi tertentu, yang dapat memengaruhi pemirsa dan opini publik secara keseluruhan.

Dalam konteks Global Campaign melalui agenda propaganda dan media Amerika Serikat *War on Drugs*, teori New Media Fairclough dapat digunakan untuk memahami bagaimana pesan-pesan anti-narkoba disampaikan melalui media dan dampaknya terhadap pandangan masyarakat. Analisis teks media dapat membantu mengidentifikasi bagaimana bahasa, narasi, dan framing digunakan untuk memperkuat pesan-pesan anti-narkoba, serta untuk mengeksplorasi kekuatan ideologis di balik pesan tersebut.

Fairclough menekankan pentingnya memperhatikan tiga dimensi dalam analisis teks media: produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam konteks *War on Drugs*, produksi mengacu pada cara pesan-pesan anti-narkoba dirancang, diproduksi, dan disebarkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kampanye tersebut. Distribusi merujuk pada cara pesan-pesan tersebut disebarkan melalui berbagai saluran media, sementara konsumsi berkaitan dengan cara pemirsa memahami, menginterpretasikan, dan merespons pesan-pesan tersebut.

Dalam hal ini, ideologi yang ditanamkan adalah ideologi anti-narkoba. Ideologi ini didasarkan pada pandangan bahwa narkoba adalah musuh utama masyarakat dan harus

diberantas. Global campaign dan media propaganda digunakan untuk mempromosikan ideologi ini kepada khalayak di Thailand. Kampanye-kampanye ini sering menggunakan kata-kata yang kuat dan dramatis untuk menggambarkan bahaya narkoba. Gambar-gambar dan video yang dramatis juga sering digunakan untuk menunjukkan dampak negatif narkoba. Teknik-teknik ini digunakan untuk menciptakan kesan bahwa narkoba adalah ancaman serius bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan dukungan mereka terhadap upaya perang melawan narkoba. Berikut merupakan upaya-upaya Amerika Serikat dalam Global Campaign War On Drug di Thailand yang dapat dilihat ditabel 2.1.

Tabel 2.1 Upaya AS dalam mempromosikan WOD di Thailand

Tahun	Bentuk Campaign
1971	Departemen Luar Negeri AS meluncurkan kampanye propaganda anti-narkoba di Thailand yang berjudul "The War on Drugs." Kampanye ini menggunakan poster, iklan, dan film untuk menyebarkan pesan-pesan negatif tentang narkoba dan penyalahgunaan narkoba
1980	Departemen Luar Negeri AS bekerja sama dengan pemerintah Thailand untuk memproduksi film dokumenter anti-narkoba berjudul "The Golden Triangle." Film ini menggambarkan Thailand sebagai pusat perdagangan narkoba internasional dan mengintimidasi masyarakat Thailand dengan gambaran kekerasan dan kejahatan yang dikaitkan dengan narkoba.
1990	Departemen Luar Negeri AS mendanai kampanye anti-narkoba di Thailand yang menggunakan media sosial untuk menargetkan kaum muda. Kampanye ini menggunakan pesan-pesan yang mengintimidasi dan menghakimi untuk mencegah kaum muda dari menggunakan narkoba.
2000	Departemen Luar Negeri AS meluncurkan kampanye propaganda anti-narkoba di Thailand yang berjudul "The Golden Triangle: A Threat to the World." Kampanye ini menggunakan poster, iklan, dan film untuk menggambarkan Thailand sebagai pusat perdagangan narkoba internasional dan mengintimidasi masyarakat Thailand dengan gambaran kekerasan dan kejahatan yang dikaitkan dengan narkoba.
2002	Departemen Luar Negeri AS bekerja sama dengan pemerintah Thailand untuk meluncurkan kampanye anti-narkoba yang berjudul "Say No to Drugs." Kampanye ini menggunakan berbagai media, termasuk televisi, radio, dan surat kabar, untuk menyebarkan pesan-pesan negatif tentang narkoba dan penyalahgunaan narkoba.
2006	Departemen Luar Negeri AS mendanai kampanye anti-narkoba yang menargetkan kaum muda di Thailand. Kampanye ini menggunakan pesan-pesan yang mengintimidasi dan menghakimi untuk mencegah kaum muda dari menggunakan narkoba.
2010	Departemen Luar Negeri AS meluncurkan kampanye anti-narkoba yang berjudul "Drugs: Destroying Our Future." Kampanye ini menggunakan poster, iklan, dan film untuk menggambarkan narkoba sebagai ancaman bagi masa depan Thailand.
2016	Departemen Luar Negeri AS bekerja sama dengan pemerintah Thailand untuk meluncurkan kampanye anti-narkoba yang berjudul "Drugs: Not Worth It." Kampanye ini menggunakan pesan-pesan yang menekankan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa propaganda dan media dapat menjadi alat yang efektif untuk membentuk persepsi masyarakat tentang suatu isu. Dalam hal ini, propaganda dan media telah berhasil membentuk persepsi masyarakat Thailand tentang bahaya narkoba. Masyarakat Thailand kini lebih sadar akan bahaya narkoba dan lebih mendukung upaya perang melawan narkoba.

Keberhasilan propaganda dan media dalam membentuk persepsi masyarakat Thailand tentang bahaya narkoba menunjukkan bahwa propaganda dan media dapat menjadi alat yang efektif untuk mempengaruhi kebijakan publik. Propaganda dan media dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting, seperti bahaya narkoba.

2.2.2. Perumusan Kebijakan Luar Negeri dalam Prespektif Konstruktivisme

Rosenau berpendapat bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang statis dan objektif, melainkan sesuatu yang dinamis dan dibentuk oleh interaksi manusia. Dalam konteks perumusan kebijakan luar negeri, hal ini berarti bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor material, seperti kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh faktor-faktor non-material, seperti persepsi, opini publik, dan norma-norma internasional (Rosenau, 1961).

Rosenau sendiri telah mengemukakan berbagai teori tentang perumusan kebijakan luar negeri yang menekankan peran faktor-faktor non-material. Misalnya, dalam bukunya yang berjudul *The Scientific Study of Foreign Policy* (1961), Rosenau berpendapat bahwa persepsi adalah faktor yang penting dalam perumusan kebijakan luar negeri. Rosenau juga berpendapat bahwa opini publik dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Opini publik dapat mempengaruhi pembuat kebijakan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan nasional. Jika opini publik mendukung kepentingan

nasional, maka pembuat kebijakan akan cenderung mengambil kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasional tersebut (Rosenau, 1961).

Behvaresh juga berpendapat bahwa pendekatan konstruktivis dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang perilaku negara dalam hubungan internasional, terutama dalam konteks perubahan global. Behvaresh juga menjelaskan bahwa pendekatan konstruktivis berfokus pada peran ide, norma, dan identitas dalam membentuk perilaku negara. Pendekatan ini berpendapat bahwa negara bukanlah aktor yang rasional dan otonom, melainkan aktor yang dibentuk oleh struktur sosial dan budaya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendekatan konstruktivis dapat diterapkan untuk menganalisis kebijakan luar negeri (Behvaresh, 2011).

Dalam konteks kebijakan luar negeri Thailand mengenai legalisasi ganja dapat dianalisis menggunakan pendekatan konstruktivis. Pendekatan ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana ide, norma, dan identitas membentuk kebijakan tersebut. Ide tentang manfaat medis dan industri ganja memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan tersebut. Pemerintah Thailand percaya bahwa legalisasi ganja dapat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian negara (Behvaresh, 2011).

Norma internasional tentang legalisasi ganja juga berpengaruh terhadap kebijakan tersebut. Semakin banyak negara yang melegalkan ganja, semakin besar tekanan yang dihadapi Thailand untuk mengikuti tren tersebut. Identitas Thailand sebagai negara yang progresif juga menjadi faktor penting dalam pembentukan kebijakan tersebut. Pemerintah Thailand ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Thailand adalah negara yang terbuka dan inovatif (Behvaresh, 2011).

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Rosenau. Rosenau berpendapat bahwa dalam proses perumusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh berbagai faktor, Rosenau membagi faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri menjadi dua kategori, yaitu :

1. Faktor internal: Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam negara, seperti:
 1. Sistem politik: Sistem politik suatu negara menentukan bagaimana kebijakan luar negeri dirumuskan.
 2. Pemerintah: Pemerintah adalah aktor utama dalam perumusan kebijakan luar negeri.
 3. Masyarakat: Masyarakat juga dapat mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri, misalnya melalui opini publik.
2. Faktor eksternal: Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar negara, seperti:
 - a. Lingkungan internasional: Lingkungan internasional, seperti sistem internasional, dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.
 - b. Peristiwa internasional: Peristiwa internasional, seperti perang atau krisis, juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

Dalam kasus legalisasi ganja di Thailand, pendapat rekonstruksi kebijakan luar negeri Rosenau dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi kebijakan ini. Faktor internal yang mempengaruhi kebijakan ini termasuk sistem politik Thailand yang demokratis, dukungan publik yang meningkat untuk legalisasi ganja, dan peran pemerintah Thailand dalam mempromosikan industri ganja. Faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan ini termasuk perubahan wacana

tentang narkoba di dunia, tekanan dari negara-negara lain yang telah melegalkan ganja, dan potensi ekonomi dari industri ganja (Rosenau, 1961).

Selain itu juga Wendt berpendapat bahwa dunia sosial bukanlah sesuatu yang given, melainkan dibangun oleh manusia melalui interaksi sosial (Wendt, 1992). Wendt menyatakan bahwa ada dua inti dasar konstruktivisme, yaitu:

1. Struktur hubungan manusia lebih ditentukan oleh gagasan bersama alih-alih dorongan materi.
2. Identitas beserta kepentingan aktor yang berkepentingan dikonstruksi oleh gagasan bersama alih-alih diturunkan secara alamiah.

Wendt berpendapat bahwa struktur internasional bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dapat berubah seiring dengan perubahan dalam identitas, kepentingan, dan norma. Selain itu norma internasional dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku negara, bahkan jika norma tersebut tidak didukung oleh kekuatan material. Konsep Identitas disini merupakan sebuah kategori yang mendefinisikan siapa kita dan membedakan kita dari orang lain. Wendt berpendapat bahwa identitas negara dapat menjadi faktor yang menentukan dalam perilaku negara. Misalnya, negara yang memiliki identitas sebagai negara damai cenderung lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku kooperatif, sedangkan negara yang memiliki identitas sebagai negara agresif cenderung lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku agresif (Wendt, 1992).

Kemudian konsep dari kepentingan sendiri dapat didefinisikan sebagai "nilai-nilai yang kita perjuangkan", yang mana hal ini dapat diartikan bahwa kepentingan negara dapat dibentuk oleh identitas negara. Misalnya, negara yang memiliki identitas sebagai negara damai cenderung lebih cenderung untuk memiliki kepentingan dalam perdamaian, sedangkan negara yang memiliki identitas sebagai negara agresif cenderung

lebih cenderung untuk memiliki kepentingan dalam perang. Wendt berpendapat bahwa norma internasional dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku negara. Norma internasional adalah aturan, prinsip, dan nilai yang diterima oleh masyarakat internasional, sehingga suatu norma internasional dapat membentuk identitas, kepentingan, dan perilaku negara(Wendt, 1992).

Misalnya, norma internasional tentang non-agresi dapat membentuk identitas negara sebagai negara damai, dan dapat mendorong negara tersebut untuk menghindari perilaku agresif. Norma internasional tentang hak asasi manusia dapat membentuk kepentingan negara dalam mempromosikan hak asasi manusia, dan dapat mendorong negara tersebut untuk terlibat dalam perilaku yang mempromosikan hak asasi manusia(Gerrard & Kratochwil, 2001).

Selain itu jika melalui pandangan konstruksivisme digunakan untuk menjelaskan bagaimana wacana tentang narkoba mempengaruhi kebijakan legalisasi ganja di Thailand. Konstruktivisme berpendapat bahwa realitas sosial, termasuk kebijakan luar negeri, dibentuk oleh interpretasi aktor-aktor yang terlibat. Dalam konteks legalisasi ganja di Thailand, aktor-aktor yang terlibat adalah Thailand, Amerika Serikat, dan komunitas internasional (Erbas, 2022).

Wacana tentang narkoba yang didominasi oleh Amerika Serikat telah menempatkan Thailand dalam posisi yang sulit. Thailand adalah salah satu negara yang berada di bawah pengaruh global campaign AS *War on Drugs*. Wacana ini telah membentuk identitas Thailand sebagai negara yang melawan narkoba(Erbas, 2022).

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, wacana tentang narkoba telah mulai berubah. Ada peningkatan kesadaran tentang dampak negatif dari global campaign AS

War on Drugs, termasuk tingginya jumlah penangkapan dan penahanan orang-orang yang menggunakan narkoba secara rekreasional (McBerh, 2001).

Dengan banyaknya kasus keserasan dan penangkapan secara sepihak oleh oknum polisi di Thailand, kebijakan WOD juga belum efektif dalam menanggulangi dan memberantas narkoba di kalangan masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pengguna narkoba di Thailand dari 1,5 juta orang pada tahun 2012 menjadi 1,6 juta orang pada tahun 2017. Dengan kurang efektifnya kebijakan WOD ini memunculkan penolakan dari masyarakat Thailand. Penolakan ini berasal dari diadakannya pemberlakuan hukuman mati bagi pengguna narkoba juga dianggap tidak sesuai dengan budaya Thailand. Hukuman mati adalah hukuman yang paling berat dalam hukum Thailand. Namun, hukuman mati bagi pengguna narkoba dianggap tidak adil, karena pengguna narkoba bukanlah pelaku kejahatan yang paling berat (Windle, 2015).

Desakan dari masyarakat membuat pemerintah Thailand mulai mengubah cara pandangnya terhadap narkoba. Masyarakat mulai menyadari bahwa permasalahan narkoba tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan represif. Narkoba merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Pemerintah Thailand juga menyadari bahwa kebijakan *War on Drugs* yang berfokus pada penegakan hukum tidak efektif dalam mengatasi masalah narkoba secara jangka panjang. Kebijakan ini justru menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya kekerasan dan konflik, serta pelanggaran hak asasi manusia (Windle, 2015).

Perubahan cara pandang masyarakat ini mendorong pemerintah Thailand untuk merekonstruksi kembali kebijakan luar negerinya mengenai permasalahan narkoba. Pemerintah Thailand mulai menganut pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan

narkoba. Pendekatan ini menekankan pada upaya pencegahan dan rehabilitasi, serta mengurangi stigma terhadap pengguna narkoba. Perubahan pendekatan ini juga telah mempengaruhi cara Thailand memahami realitas dan bagaimana Thailand mengambil keputusan tentang narkoba. Hal ini tentunya sejalan dengan pendapat Alexander Wendt mengatakan, identitas nasional adalah produk dari interaksi sosial dan interpretasi bersama. Yang mana Pendapat publik dapat mempengaruhi identitas nasional suatu negara dengan membentuk persepsi masyarakat terhadap diri sendiri dan dunia di sekitarnya (Wendt, 1992).

Kemudian di tahun 2022, Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalisasi ganja untuk keperluan medis dan rekreasional. Legalisasi ganja ini merupakan perubahan kebijakan luar negeri yang signifikan bagi Thailand. Perubahan ini menunjukkan bahwa Thailand telah mulai mendefinisikan kembali identitasnya sebagai negara yang melawan narkoba. Yang mana dalam paradigma konstruktivisme melihat bahwa dalam upaya merancang kebijakan luar negeri, aspek-aspek seperti identitas, kepentingan, dan norma memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku suatu negara. Konstruktivisme juga menjelaskan bagaimana suatu rekonstruksi kebijakan yang dipengaruhi oleh identitas, kepentingan, dan norma dapat mempengaruhi perilaku suatu negara. Selain itu dalam Konstruktivisme memandang bahwa pembuat kebijakan harus mempertimbangkan faktor - faktor tersebut dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengembangkan norma dan aturan baru yang dapat mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan(Thabchumpon & Walker, 2023).

Dalam konteks Thailand, makna-makna yang dianut oleh negara tersebut terkait dengan masalah narkoba telah berubah dari menganggap ganja sebagai barang terlarang menjadi menganggap ganja sebagai barang yang dapat digunakan untuk tujuan medis

dan rekreasional. Perubahan makna ini telah mendorong Thailand untuk melegalkan ganja. Selain itu juga interaksi Thailand dengan negara-negara lain, seperti Kanada dan Amerika Serikat, yang telah melegalkan ganja, telah mendorong Thailand untuk melegalkan ganja. Konstruktivisme juga dapat mendorong Thailand dalam melegalkan ganja melalui berbagai cara, antara lain:

1. Perubahan Makna

Konstruktivisme berpendapat bahwa realitas sosial, termasuk kebijakan luar negeri suatu negara, dibentuk oleh makna-makna yang dianut oleh negara tersebut. Dalam konteks Thailand, perubahan makna yang dianut oleh masyarakat Thailand terkait dengan masalah narkoba telah mendorong Thailand untuk melegalkan ganja (Kama et al., 2021).

Pada masa lalu, ganja dianggap sebagai barang terlarang di Thailand. Hal ini didasarkan pada makna yang dianut oleh masyarakat Thailand terkait dengan masalah narkoba. Masyarakat Thailand menganggap bahwa narkoba adalah musuh utama masyarakat dan harus diberantas (Pratama et al., 2023).

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, makna yang dianut oleh masyarakat Thailand terkait dengan masalah narkoba telah berubah. Masyarakat Thailand mulai menyadari bahwa ganja memiliki manfaat medis, seperti untuk mengurangi nyeri, mual, dan muntah. Selain itu, masyarakat Thailand juga mulai menyadari bahwa legalisasi ganja dapat mengurangi kejahatan terkait narkoba (Pratama et al., 2023).

2. Faktor Sosial dan Budaya

Konstruktivisme juga berpendapat bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Dalam konteks Thailand, faktor-faktor

sosial dan budaya, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat tentang manfaat ganja, telah mendorong Thailand untuk melegalkan ganja. Semakin banyak masyarakat Thailand yang menyadari manfaat ganja, terutama untuk tujuan medis. Hal ini telah mendorong pemerintah Thailand untuk mempertimbangkan kemungkinan melegalkan ganja (Yimsaard, 2023).

c. Interaksi dengan negara lain

Konstruktivisme juga berpendapat bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dibentuk oleh interaksi antara negara tersebut dengan negara-negara lain. Dalam konteks Thailand, interaksi Thailand dengan negara-negara lain yang telah melegalkan ganja, seperti Kanada dan Amerika Serikat, telah mendorong Thailand untuk melegalkan ganja. Interaksi ini telah menunjukkan kepada Thailand bahwa legalisasi ganja dapat dilakukan secara efektif dan aman. Hal ini telah mendorong Thailand untuk mempertimbangkan kemungkinan melegalkan ganja (Charoenwisedsil et al., 2023).

d. Norma internasional

Konstruktivisme juga berpendapat bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh norma-norma internasional. Dalam konteks Thailand, norma-norma internasional, seperti Deklarasi PBB tentang Penghapusan Penggunaan Obat-Obatan Ilegal dan Perdaganganannya, telah mendorong Thailand untuk melegalkan ganja. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Penggunaan Obat-Obatan Ilegal dan Perdaganganannya tidak lagi secara eksplisit melarang penggunaan ganja untuk tujuan medis. Hal ini telah memberikan ruang bagi negara-negara untuk melegalkan ganja (Yimsaard, 2023).

e. Kepentingan nasional

Konstruktivisme juga berpendapat bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dibentuk oleh kepentingan nasional negara tersebut. Dalam konteks Thailand, kepentingan nasional Thailand untuk meningkatkan akses ke pengobatan ganja dan mengurangi kejahatan terkait narkoba telah mendorong Thailand untuk melegalkan ganja. Legalisasi ganja dapat meningkatkan akses masyarakat Thailand ke pengobatan ganja, terutama untuk orang-orang yang tidak mampu membelinya. Selain itu, legalisasi ganja juga dapat mengurangi kejahatan terkait narkoba (Chusakulnitisin, 2022).

Secara langsung, sistem mempengaruhi Thailand dalam melegalisasi ganja melalui aturan dan regulasi yang berlaku di negara tersebut. Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand pada tahun 2022 telah melegalkan ganja untuk penggunaan medis dan rekreasional. Undang-undang ini telah mengubah status ganja dari barang terlarang menjadi barang yang dapat digunakan secara legal.

Secara tidak langsung, sistem mempengaruhi Thailand dalam melegalisasi ganja melalui budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Thailand. Budaya Thailand yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, seperti agama dan moralitas, telah menjadi hambatan bagi upaya legalisasi ganja. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, budaya Thailand telah mengalami perubahan. Masyarakat Thailand mulai menerima manfaat ganja, terutama untuk tujuan medis (Charoenwisedsil et al., 2023).

Selain itu, sistem juga mempengaruhi Thailand dalam melegalisasi ganja melalui interaksi dengan negara-negara lain. Thailand berinteraksi dengan negara-negara lain yang telah melegalkan ganja, seperti Kanada dan Amerika Serikat. Interaksi ini telah menunjukkan kepada Thailand bahwa legalisasi ganja dapat dilakukan secara efektif dan aman (Kama et al., 2021).

2.3. Asumsi Penelitian

Dengan melihat permasalahan, penelitian terdahulu, serta teori – teori yang ada maka untuk melihat situasi Thailand dalam melegalisasi ganja di negaranya, dalam penelitian ini berpendapat bahwa rekonstruksi kebijakan luar negeri Thailand legalisasi ganja dipengaruhi pada situasi internasional dan situasi domestic di Thailand.

2.4. Kerangka Analisis

